

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan permukiman antara lain sebagian masyarakat yang belum memahami dengan baik kawasan perumahan dan permukiman sehingga diperlukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi akan pentingnya pembangunan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan kawasan. menjadi lebih maju dan mandiri.

Masalah lain yaitu masyarakat masih mengharapkan setiap pembangunan di lingkungannya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu lahan dan ruang di perkotaan yang terbatas menjadikan kawasan perkotaan menjadi daya tarik bagi masyarakat dan masyarakat migran untuk datang dan tinggal karena kemudahan aksesibilitas ke pusat kota. Akibatnya sering dijumpai kawasan perkotaan menjadi kumuh karena lahan dan ruang yang terbatas telah beralih fungsi ruang, seperti: sempadan jalan, trotoar, saluran, ruang terbuka hijau dll digunakan untuk tempat berdagang atau bahkan sebagai tempat hunian.

Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa (2015:2) permukiman dapat diartikan sebagai suatu bentuk, baik buatan manusia maupun alam dengan segala kelengkapannya yang digunakan oleh manusia sebagai individu dan kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun permanen dalam rangka mengatur kehidupan mereka.

Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal untuk berteduh. Mereka akan memanfaatkan apa saja untuk bertahan hidup, begitu juga dengan masyarakat miskin yang tinggal di pemukiman dengan kualitas yang buruk dan sarana prasarana seadanya dan biasanya dengan kondisi yang kumuh dan tidak sehat. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat miskin di daerah perkotaan dimana perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi jumlah penduduk di suatu kota dengan lahan yang terbatas. Hal ini adalah salah satu penyebab terjadinya pemukiman kumuh di perkotaan. Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat adalah ciri-ciri pemukiman kumuh menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak untuk digunakan karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana yang tidak memenuhi prasyarat. Dengan adanya permukiman yang tidak layak huni perlu adanya penanganan kualitas kualitas permukiman kumuh.

Penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat (Adviyanti, 2016). Partisipasi adalah pengambilan bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dimana terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, kebijakan perumusan, dan pengambilan keputusan (Mubyarto,1997) dalam Hurrarah (2008: 96).

Menurut Kurniasi (2007) permukiman adalah permukiman dengan kondisi (bangunan) rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut. Bangunan rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta fasilitas sosial lainnya. Pada dasarnya, munculnya lingkungan permukiman kumuh disebabkan karena adanya daya tarik daerah

perkotaan yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas kota yang tinggi, lowongan pekerjaan, pendidikan dan kemudahan jangkauan.

Salah satu usaha penanganan kawasan permukiman kumuh adalah dengan melibatkan masyarakat yang mendiami kawasan kumuh tersebut. Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menjadi kekuatan dan pendorong pembangunan yang efektif. Menurut Sejati (2010) dalam Butar (2012:2) mengatakan bahwa pendekatan partisipasi dalam upaya penataan lingkungan permukiman kumuh diperlukan karena mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan permintaan local, perubahan perilaku dan mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharannya. Sementara itu Myrdal (dalam Conyers, 1994: 154) dalam penelitian Sulaiman (2005:4) berpendapat bahwa para penguasa elite menyadari bahwa kecil sekali harapan adanya perencanaan yang efektif dalam pembangunan, bila tanpa dukungan masyarakat.

Keberhasilan program penataan lingkungan permukiman kumuh sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan, yang menempati dan memanfaatkan permukiman tersebut. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengembangannya, sehingga diantara mereka tumbuh rasa memiliki terhadap proyek-proyek tersebut (Conyers, 1994 dalam Sulaiman, 2005:5). Alinsky dalam Sulaiman (2005:5) mengatakan bahwa jika masyarakat mencapai keberhasilan dalam program pembangunan yang mereka tangani, mereka akan merasa bahwa udahnya berharga.

Kelurahan Purus adalah salah satu keluarahan yang ada di Kota Padang dan termasuk kedalam Kecamatan Padang Barat. Luas wilayah di Kelurahan Purus sebesar 68 Ha, yang terdiri dari 8 (delapan) RW dan 28 RT. Jumlah Penduduk Kelurahan Purus berdasarkan data BPS di Kelurahan Purus tahun 2019 sebanyak 8.375 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang ada sebesar 123,16 Ha/jiwa. Dilihat dari jumlah kepadatan populasi yang cukup tinggi menimbulkan

permasalahan terutama permasalahan lingkungan, salah satunya adalah munculnya permukiman kumuh. Permukiman tersebut muncul karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan daya tampung lingkungan dan juga keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 163 Tahun 2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kelurahan Purus termasuk dalam lokasi kawasan permukiman kumuh. Dan pada tahun 2020 dikeluarkanlah SK Walikota Padang Nomor 519 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dimana Kelurahan Purus tidak lagi termasuk di dalam kawasan Kumuh. Namun setelah dilakukan peninjauan kembali oleh peneliti di lokasi yang akan diteliti tersebut masih terdapat bangunan rumah yang tidak layak huni, permasalahan persampahannya, kondisi drainase dan jalan lingkungan yang belum sesuai dengan standar PSU minimum, hal ini menunjukkan bahwa penanganan infrastruktur belum maksimal.

Namun berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengatasi masalah tersebut telah dirasakan belum maksimal dan masih banyak yang perlu dibenahi. Dalam penanganan ini diperlukan partisipasi dan peran masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tertata rapi dengan. Oleh sebab itu penulis ingin melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam penanganan infrastruktur di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman di Kelurahan Purus?
2. Bagaimana bentuk penanganan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Permukiman di Kelurahan Purus?
3. Bagaimana mengatasi permasalahan infrastruktur di kawasan permukiman Purus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menemukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan infrastruktur permukiman di Kelurahan Purus.
2. Menemuka bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan Infrastruktur di kawasan permukiman Purus
3. Merumuskan permasalahan-permasalahan infrastruktur di kawasan permukiman Purus
4. Merumuskan Kriteria Desain Penanganan Infrastruktur

1.4 Keaslian Penelitian

Sebelum penulis mengambil tema terkait penilaian partisipasi masyarakat terhadap penanganan infrastruktur di kawasan purus, penulis telah melihat dan membaca beberapa penelitian yang dilakukan pada kawasan permukiman.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian
1	Susi Nurhayati	Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) (Studi Kasus : Desa Kota Pantolabu Kabupaten Aceh Utara)	Mengidentifikasi, mengkaji dan menemukan bentuk partisipasi dan tingkatan partisipasi masyarakat Desa Kota Pantolabu dalam tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi pada program Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS)	Kualitatif
2	Elmi Sumiyarsono	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih di Desa Wowoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolona Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Mengkaji mekanisme pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wowoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono 2. Mengkaji hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan masyarakat desa didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih	Kualitatif Deskriptif
3	Irma Purnamasari	Studi Partisipasi Masyarakat	Menganalisis proses perencanaan	Kualitatif

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian
4	Sutami	Partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara	Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Utara	Deskriptif Kualitatif
5	Ummul Chusnah	Evaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta	Fokus penelitian ini yaitu mengevaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 dan melihat bentuk, tingkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi	Deskriptif

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis adalah mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur.
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan adalah meningkatkan partisipasi dan interaksi sosial baik individu maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di lingkungan huniannya.
3. Menambah wawasan bagi pembaca tentang partisipasi masyarakat dalam penanganan infrastruktur kawasan